

PERTANGGUNGJAWABAN – PELAKSANAAN – APBD

2022

PERDA NO. 9, LD 2022 / NO.9 : 12 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa hal diantaranya :
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan, memuat : laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan yang meliputi : Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang, dan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global.
Catatan atas laporan keuangan pada Peraturan Daerah ini memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2021.
Nilai anggaran pendapatan dan belanja pada laporan realisasi anggaran pada Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 19 Agustus 2022.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Walikota.